

Kepentingan Amerika Serikat terhadap Bantuannya dalam Permasalahan Kudeta Militer Myanmar Era Joe Biden

Amanda Khairunissa Yunus¹, Nindya Raihan Zani², Rihhadatul Aisya³, Reza Santika⁴, Sonia Pesliko⁵

¹Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Andalas, Indonesia, amandakhairunissa@gmail.com

²Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Andalas, Indonesia, nindyaaaraihanzani@gmail.com ³Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Andalas, Indonesia, aisyarihhadatul@gmail.com

⁴Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Andalas, Indonesia, reezasantika92@gmail.com

⁵Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Andalas, Indonesia, soniapesliko29@gmail.com

ABSTRAK

Myanmar telah mengalami krisis demokrasi dan menghadapi kekerasan perampasan hak-hak kemanusiaan oleh junta militer. Konflik antara pihak militer dan kemenangan partai Aung San Suu Kyi yaitu partai NLD (*National League for Democracy*) menyebabkan Myanmar mengalami kudeta sejak februari 2021. Urgensi HAM dari permasalahan Myanmar tersebut menyebabkan lembaga-lembaga internasional dan sejumlah negara seperti Amerika Serikat turut membantu Myanmar dalam menyelesaikan masalahnya baik memberikan bantuan dana maupun bantuan pembangunan pemerintahan lainnya untuk Myanmar, melalui lembaganya *USAID (United States Agency for International Development)*. Adanya bantuan USAID terhadap Myanmar menandakan adanya hal yang mendorong bantuan AS terhadap Myanmar yang memunculkan pertanyaan; apa kepentingan AS melalui USAID dalam membantu Myanmar. Yang mana pertanyaan-pertanyaan itu akan dijawab dalam tulisan ini dengan pendekatan historis berdasarkan teori liberalisme.

Kata kunci: Kudeta Militer; Liberalisme; Myanmar; USAID

ABSTRACT

Myanmar has experienced a democracy crisis and is facing a violent war for human rights by the military junta. The conflict between the military and the victory of Aung San Suu Kyi's party, namely the NLD (National League for Democracy) party, caused Myanmar to experience a coup since February 2021. The human rights urgency of the Myanmar problem caused international institutions and a number of countries such as the United States to help Myanmar in resolving the problem by both providing financial assistance and other government development assistance to Myanmar, through its agency USAID (United States Agency for International Development). The existence of USAID assistance to Myanmar indicates that there are things that encourage US assistance to Myanmar which raises questions; what are the interests of the US through USAID in helping Myanmar. Which questions will be answered in this paper with a historical approach based on the theory of liberalism.

Keywords: Military Coup; Liberalism; Myanmar; USAID

Pendahuluan

Militer Myanmar berperan penting dalam memperjuangkan kemerdekaan. Hal tersebut dilihat saat Tentara Independen Myanmar atau dikenal dengan ‘Tatmadaw’ dipimpin oleh 30 orang dimana salah satu diantaranya ialah Ne Win yang memperoleh kemerdekaan dari Kerajaan Inggris. Setelah merdeka, U Nu dipilih menjadi Perdana Menteri pertama di Myanmar sehingga mulai terbentuknya pemerintahan yang konstitusional. Secara perlahan pemerintahan sipil juga terbentuk, namun upaya integrasi yang ingin dicapai mengalami kegagalan, dengan kemunculan permasalahan domestik, masalah etnis, pemberontakan yang saling menggunakan senjata bahkan permasalahan korupsi. Kondisi ini menyebabkan Militer mengundang U Nu untuk membentuk pemerintah sementara di bawah kepemimpinan Ne Win. Pada tahun 1960 diadakannya pemilihan umum, dimana partai U Nu membentuk Pemerintah Sipil bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Myanmar namun akhirnya mengalami kegagalan. Hal tersebut menyebabkan terjadinya kudeta militer pertama pada tahun 1962 di bawah Jenderal Ne Win dan menggulingkan pemerintahan sipil. Peristiwa tersebut menjadi awal dari pemerintahan militer langsung serta berakhirnya demokrasi konstitusional. Setelah kudeta, terjadinya penangkapan anggota pemerintah, penangguhan konstitusi dan menunjuk seorang Dewan Revolusi (RC) untuk Memerintah Myanmar yang dilakukan oleh pemerintah militer. Tahun 1962-1974 merupakan fase pertama pemerintahan militer langsung terjadi dan fase kediktatoran pemerintahan militer berada di bawah Dewan Revolusi (RC) dimana terdiri dari pejabat militer.¹

Pada 1 Februari 2021, setelah berjalannya proses demokrasi dimana pemilihan umum dimenangkan oleh partai *National League for Democracy* (NLD), selanjutnya militer kembali mengambil alih kekuasaan Myanmar yang dipimpin oleh panglima tertinggi Min Aung Hlaing, sehingga kekuatan ‘Tatmadaw’ kembali berhasil dipertahankan. Berbeda halnya dengan motivasi kudeta pertama tahun 1962 yang disebabkan kegagalan pemerintah sipil dalam menyelesaikan permasalahan domestik, kudeta Militer saat ini dikarenakan pihak militer menuduh terjadinya kecurangan saat pemungutan suara serta kemenangan yang diklaim partai NLD sebagai penipuan, meskipun komisi pemilihan telah mengatakan tidak ada bukti yang mendukung tuduhan tersebut. Setelah kudeta militer dilakukan, pihak angkatan bersenjata melakukan penangkapan pejabat NLD serta Aung San Suu Kyi yang memenangkan pemilihan dan berjanji akan melaksanakan pemilihan ulang setelah keadaan darurat berakhir.² Pemimpin kudeta Min Aung Hlaing merupakan sosok yang sama dalam bertanggung jawab mengenai pelanggaran hak asasi manusia terhadap minoritas Rohingnya di Myanmar, sehingga kemungkinan akan terjadinya kekejaman di masa depan sehingga perlu adanya pengawasan³ Kehadiran kudeta memicu respon dan demonstrasi dari masyarakat sipil yang menentang pengambil alihan kekuasaan, protes juga didukung dengan adanya pemogokan baik dari sektor ekonomi, kesehatan sampai kepemimpinan sipil.⁴ Kondisi ini menunjukkan kekhawatiran masyarakat akan terulang kembalinya pemerintahan militer serta bentuk dari keinginan masyarakat agar negara kembali ke jalur demokrasi.

¹ Devi, Konsham, “Myanmar under the military rule 1962-1988”, *International Research Journal of Social Sciences*, Vol. 3(10) (October 2014): 46-50. <http://www.isca.in/IJSS/Archive/v3/i10/8.ISCA-IRJSS-2014-173.pdf>.

² Aida, R. N, “Kudeta Myanmar, Sebab, dan Apa yang Sebenarnya Terjadi?,” Kompas.com, February, 12 2021, <https://www.kompas.com/tren/read/2021/02/12/123000265/kudeta-myanmar-sebab-dan-apa-yang-sebenarnya-terjadi-?page=1>.

³ Enos Olivia, “Scaling up the U.S. Response to the Coup in Burm (Report No. 3629)”, *The Heritage Foundation*. <https://www.heritage.org/asia/report/scaling-the-us-response-the-coup-burma>.

⁴ Ibid.

Dampak yang diberikan oleh kudeta pada tahun 2021 tersebut telah memicu berbagai tanggapan dari banyak negara diantaranya pembekuan kerjasama di bidang pertahanan oleh Korea Selatan, pemberhentian bantuan dari Jepang, dan berbagai pernyataan kecaman dari negara-negara lainnya.⁵ Hal ini menjelaskan bahwa kekacauan politik yang dialami Myanmar akibat kudeta 2021 telah mendorong Myanmar untuk menjadi negara yang kacau secara politik (ditandai dengan citranya yang dikecam dunia) dan secara ekonomi (dengan stabilitas ekonomi yang merosot jatuh akibat penghentian kerjasama dan bantuan dari dunia). Sehingga, Myanmar terancam menjadi negara yang gagal atau 'failed state' sesuai dengan konsep Zartman yang mendefinisikan 'failed state' terjadi ketika fungsi dasar negara tidak lagi dijalankan dalam situasi di mana struktur, otoritas (kekuasaan yang sah), hukum dan tatanan politik menjadi berantakan.⁶ Keberadaan negara yang gagal akan memberikan dampak bagi domestik negara tersebut maupun terhadap stabilitas keamanan dunia, hal ini dapat dijelaskan lebih luas tentang bagaimana munculnya banyak pengungsi ilegal, operasional kriminal transnasional yang diakibatkan oleh negara-negara yang mengalami kegagalan stabilitas tersebut.⁷ Hal ini menyimpulkan bahwa permasalahan kudeta Myanmar tidak hanya memberikan dampak buruk terhadap Myanmar, namun juga terhadap stabilitas keamanan dunia.

Perkembangan demokrasi dan hak asasi manusia di Myanmar tidak terlepas dari keharmonisan hubungan luar negeri antara Myanmar dan Amerika Serikat. Hubungan harmonis tersebut dapat dilihat pada tahun 2011, ketika Menteri Luar Negeri Hillary Clinton memberikan apresiasi terhadap Langkah-langkah yang telah diambil pemerintah Myanmar dan mendukung upaya demokratisasi yang sedang berlangsung.⁸ Saat ini ketika kudeta militer kembali terjadi, Amerika Serikat di era Joe Biden mendukung kedamaian Myanmar, kesejahteraan dan demokratis yang menghormati hak asasi semua rakyatnya. Pemerintah Amerika Serikat menanggapi dengan cepat mengenai kudeta militer dengan melakukan peninjauan kembali sanksi dan program bantuan Amerika Serikat yang ditujukan untuk Myanmar.⁹ Hal ini menjelaskan bahwa AS telah lama membangun hubungan baik dengan Myanmar jauh dari sebelum kudeta Myanmar 2021 tersebut terjadi.

USAID selaku komunitas bantuan atau organisasi pemberi bantuan yang telah dibentuk Amerika Serikat (AS) sejak tahun 2006 telah berupaya dalam memberikan bantuannya terkait permasalahan kudeta Myanmar tersebut.¹⁰ Yang kemudian mengeluarkan keputusan langsung untuk memberikan bantuan dana

⁵ Padlika Garmabar, "Respon Dunia terhadap Kudeta Militer Myanmar", *Review of International Relations*, Vol. 3(2) (2021): 182-185, <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/rir/article/download/25166/13282>

⁶ Jonathan Di John, "The Concept, Causes and Consequences of Failed States: A Critical Review of the Literature and Agenda for Research with Specific Reference to Sub-Saharan Africa," *European Journal of Development Research*, Vol. 22 (1) (2009), <https://moscow.sci-hub.se/4141/ed16bfe1d1f71d800403ff9e1edcf6b1/djohn2009.pdf?download=true>.

⁷ Stewart Patrick, "Failed States and Global Security: Empirical Questions and Policy Dilemmas", *International Studies Review*, Vol. 9 (4) (2007): 653-658, <https://moscow.sci-hub.se/2925/ff341ff908f50fb36be7d043a9eba559/10.2307@4621865.pdf?download=true>.

⁸ Hidriyah, Siti, "Proses Demokratisasi Myanmar Menuju Pemilu Presiden Tahun 2012", *P3DI Sekretariat Jenderal DPR RI*, Vol. III, No. 24 (December 2011):1-8. http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-III-24-II-P3DI-Desember-2011-60.pdf.

⁹ Enos, Olivia, "Scaling up the U.S. Response to the Coup in Burma (Report No. 3629)", *The Heritage Foundation*. <https://www.heritage.org/asia/report/scaling-the-us-response-the-coup-burma>.

¹⁰ Padlika Garmabar, "Respon Dunia terhadap Kudeta Militer Myanmar", *Review of International Relations*, Vol. 3(2) (2021): 182-185, <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/rir/article/download/25166/13282>

sebesar \$42 Juta pada minggu yang sama ketika berita kudeta tersebut terjadi.¹¹ Bahkan USAID kembali mengirimkan bantuan sebesar lebih dari \$170 juta bantuan kemanusiaan tambahan pada September 2022 untuk populasi rentan di Burma dan Bangladesh, termasuk dukungan untuk Rohingya yang tetap tinggal di Burma, pengungsi Rohingya di Bangladesh, komunitas tuan rumah Bangladesh yang murah hati, dan komunitas lain yang terkena dampak kudeta 2021 di Burma dan konflik yang meningkat dan represi yang mengikutinya.¹² Bantuan-bantuan tersebut mencerminkan perilaku AS yang masih konsisten dengan komitmennya untuk membantu Myanmar dalam masalah yang dihadapinya selama proses demokratisasinya. Sehingga, bantuan dari peran USAID ini memberikan asumsi bagi penulis tentang hubungan kepentingannya dengan demokratisasi yang terjadi pada Myanmar.

Peran *United States Agency for International Development* (USAID) pada era Joe Biden terhadap kudeta militer yang terjadi di Myanmar tahun 2021-2022 dapat dikatakan sebagai bentuk ambisi dari Amerika Serikat untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Myanmar dengan memberikan bantuan-bantuan luar negeri agar terciptanya demokrasi dan urgensi hak asasi manusia di Myanmar tersebut. Hal tersebut menjadikan ketertarikan bagi penulis untuk melihat tindakan tersebut dalam perspektif Liberalisme dan berdasarkan pendekatan historis dimana bantuan USAID tersebut merupakan salah satu strategi AS dalam kepentingannya mengenai demokratisasi di dunia.

Metodologi

Penelitian merupakan penelitian dengan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analisis yang berfokus pada penjelasan mengenai apa kepentingan Amerika Serikat melalui USAID dalam memberikan bantuan pada kudeta Myanmar tahun 2021-2022. Kemudian, penelitian akan meneliti pada level analisis negara dengan menjadikan kepentingan Amerika Serikat sebagai unit analisis dan bantuan AS melalui USAID terhadap Myanmar sebagai unit eksplanasi. Hal tersebut didasarkan atas fokus penelitian penulis dengan pertanyaan penelitian penulis mengenai apa kepentingan AS terhadap bantuannya terhadap Myanmar pada era kudeta militer tahun 2021-2022. Yang mana batasan penelitian 2021-2022 tersebut dipilih berdasarkan rasionalisasi gelombang bantuan USAID yang secara langsung menargetkan pada “bantuan kudeta Myanmar”. Sehingga dengan menggunakan metode penelitian ini, penulis akan mendapatkan hasil deskriptif yang mendeskripsikan kepentingan AS terkait topik permasalahan dalam penelitian jurnal ini.

Penelitian ini akan menggunakan konsep Liberalisme untuk menjelaskan bagaimana Amerika Serikat berusaha untuk mempengaruhi nilai-nilai demokrasi dan Hak Asasi Manusia dunia dengan salah satu strateginya memberikan bantuan pada saat terjadinya kudeta militer di Myanmar. Yang mana dengan menganalisis masalah penelitian dengan konsep ini, maka penulis dapat menemukan jawaban dari pertanyaan penelitian. Upaya untuk menjawab hal tersebut ialah dengan teknik analisis data dari jenis penelitian deskriptif analisis yang dimulai dengan mengumpulkan data yang menunjang penelitian ini dan

¹¹ U.S. Agency For International Development, “USAID Immediately Redirects \$42 Million in Response to Military Coup in Burma”, <https://www.usaid.gov/burma/press-release/usaid-immediately-redirects-42-million-response-military-coup-burma#:~:text=USAID%20Immediately%20Redirects%20%2442%20Million,U.S.%20Agency%20for%20International%20Development>

¹² U.S. Agency For International Development, “The United States Announces More than \$170 Million in Additional Humanitarian Assistance for Vulnerable People in Burma and Bangladesh”, <https://www.usaid.gov/news-information/press-releases/sep-22-2022-united-states-announces-more-170-million-additional-humanitarian-assistance-vulnerable-people-burma-bangladesh>.

kemudian mengklasifikasikannya hingga menjadi kecocokan yang konkrit dengan permasalahan maupun konsep penelitian.

Penggunaan konsep Liberalisme menjelaskan bahwa demokrasi dan Hak Asasi Manusia merupakan dasar-dasar penting dari perspektif Liberalisme yang ingin dicapai oleh Amerika Serikat melalui lembaganya yaitu USAID (*United States Agency for International Development*) di Myanmar. Liberalisme memiliki empat asumsi utama yakni, (1) aktor negara, non-negara, aktor transnasional merupakan entitas penting dalam politik dunia, seperti perusahaan multinasional, organisasi yang berfokus pada Hak Asasi Manusia, hingga organisasi yang bergerak di bidang lingkungan. Aktor-aktor tersebut memainkan peran penting dalam perpolitikan global, (2) banyak kaum liberal melihat ekonomi atau bentuk lain dari ketergantungan atau interkoneksi antar negara dan aktor non-negara lainnya cenderung tidak dapat mencapai perdamaian, sehingga berdampak pada perilaku negara, (3) bagi kaum liberal, agenda politik Internasional bersifat luas. Kaum liberal menolak gagasan yang menjelaskan bahwa politik Internasional hanya didominasi oleh isu keamanan dan militer. Berbicara mengenai isu yang dibahas oleh Liberalisme, perspektif ini lebih membahas isu yang bersifat *low politics* seperti Hak Asasi Manusia, lingkungan, bahkan sosial, (4) berbeda dengan pandangan realis strukturalis dengan pandangan “*top-down*” nya tentang bagaimana anarki dan distribusi kemampuan dapat mempengaruhi perilaku suatu negara, banyak kaum liberal yang memilih pendekatan “*inside-out*” yang membahas bagaimana faktor-faktor yang ada di dalam masyarakat negara dan tingkat analisis individu dalam mempengaruhi hubungan Internasional dan hasilnya, (5) tugas utama untuk analisis adalah untuk menemukan kondisi dalam kolaborasi Internasional, jika bukan, perdamaian dapat dicapai.¹³ Peran organisasi Internasional merupakan fokus utama, contohnya pada integrasi regional dan ketergantungan.

Beberapa asumsi utama dalam Liberalisme yang telah dijelaskan sebelumnya akan mencoba untuk menganalisis bagaimana Amerika Serikat berusaha untuk tetap menanamkan nilai-nilai demokrasi serta Hak Asasi Manusia serta demokrasi pada saat terjadinya kudeta di Myanmar. USAID sebagai lembaga pembangunan Internasional Amerika Serikat memiliki peran yang signifikan selama terjadinya kudeta Myanmar, hal ini lah yang akan dijelaskan melalui pendekatan Liberalisme terkait peran aktor selain negara, yaitu aktor non-negara.

Analisis

a. Power Amerika Serikat dalam Sistem Internasional

Dalam hubungan internasional terdapat berbagai makna untuk menjelaskan konsep power, menurut Holsti sekurang-kurangnya *power* harus memiliki dua buah unsur yaitu pengaruh (*influence*) dan kapabilitas.¹⁴ Hal tersebut dikarenakan, suatu negara memiliki power apabila dapat mempengaruhi negara lain untuk membenarkan, memaklumi, dan mengikuti keinginan tanpa adanya paksaan, sehingga agar tindakan negara tersebut dapat diterima maka negara perlu memiliki kapabilitas atau kemampuan dalam sistem internasional. Sejak perang dunia II setelah runtuhnya sistem imperialis, *power* Amerika Serikat sebagai bapak liberalisme mulai diperhitungkan. Keberhasilan peralihan kekuasaan dikarenakan

¹³ Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppi, “International Relations Theory: Fifth Edition”, (United States: Pearson Education Inc, 2012), hal 129-130.

¹⁴ Umar Suryadi Bakry, *Dasar-Dasar Hubungan Internasional* (Jakarta: Kencana, 2017), 65.

pencapaian Amerika Serikat dalam hal ekonomi, politik dan keamanan, ketiga aspek tersebut merupakan faktor penting dalam struktur hubungan internasional. Eksistensi Amerika Serikat semakin kuat dengan kehadiran organisasi internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai pengganti Liga Bangsa Bangsa (LBB) yang tidak dapat bertahan setelah perang dunia I, tanpa adanya dukungan dari negara yang memiliki power kuat maka organisasi internasional tidak efektif. Selain itu, saat terjadinya perang dingin adanya dua *power* dalam sistem internasional antara Amerika Serikat dengan paham liberalisme dan Uni-Soviet dengan paham komunis. Namun, kegagalan dalam faktor ekonomi menyebabkan Uni Soviet mengalami keruntuhan, sehingga Amerika Serikat menjadi satu-satunya negara yang memiliki pengaruh besar dalam sistem internasional.¹⁵ Hal tersebut mempengaruhi desain dari sistem internasional dengan penyebaran paham-paham liberalisme dari Amerika Serikat seperti demokrasi dan hak asasi manusia.

Sejak dahulu Amerika Serikat telah berpengaruh dalam sistem internasional terutama dalam sektor ekonomi dengan memberikan program bantuan luar negeri ke negara lain, saat perang dingin melalui *European Recovery Program* (ERP) atau dapat dikenal sebagai Marshall Plan bertujuan untuk membantu kemerosotan ekonomi yang dialami oleh negara-negara Eropa.¹⁶ Dalam Kawasan Asia Tenggara yaitu *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) saat ini Amerika Serikat juga memiliki hubungan baik sejak 1977 dan meningkat menjadi kemitraan strategis pada 2015, kuatnya hubungan tersebut diabadikan dalam ASEAN's *Indo-Pacific Outlook*, dimana berupaya untuk mendukung perdamaian, stabilitas dan kemakmuran.¹⁷ Myanmar sebagai salah satu negara yang tergabung dalam ASEAN tidak hanya berhubungan baik dalam organisasi multilateral dengan Amerika Serikat namun secara bilateral, terutama dalam mendukung perkembangan demokrasi serta hak asasi manusia yang masih berlangsung sampai saat ini di era Joe Biden. Hal tersebut terlihat ketika Kudeta Militer terjadi di Myanmar saat ini, terdapat respon dari internasional terutama Amerika Serikat memberikan respon dengan cepat dan menjalankan program bantuan luar negeri. Sebelum kudeta militer terjadi, Amerika Serikat sebagai negara yang memberikan bantuan terbesar untuk Myanmar dibandingkan negara Kawasan Asia Tenggara lainnya.¹⁸ Oleh karena itu, *power* yang diberikan Amerika Serikat dalam sistem internasional selama ini ialah dengan memberikan dorongan atau bantuan bagi negara lain melalui sektor ekonomi seperti salah satunya program bantuan luar negeri.

b. Dinamika Hubungan Amerika Serikat melalui USAID dengan Myanmar

Amerika Serikat menjalin hubungan dengan Myanmar dalam rangka mendukung perdamaian, kesejahteraan, dan demokrasi yang menghargai Hak Asasi Manusia semua orang. Amerika Serikat memiliki komitmen yang lama untuk membantu meningkatkan kehidupan masyarakat di Myanmar. Setelah misi USAID tutup pada tahun 1989, Amerika Serikat melanjutkan bantuan kemanusiaan yang bersifat darurat terhadap perbatasan Thailand-Myanmar, termasuk melalui pendanaan dari Departemen

¹⁵ Noor Mat Yazid, "The theory of hegemonic stability, hegemonic power and international political economic stability", *Global Journal of Political Science and Administration* 2, no. 2, (April 2018): 36-47, <https://www.eajournals.org/wp-content/uploads/The-Theory-of-Hegemonic-Stability-Hegemonic-Power-and-International-Political-Economic-Stability-1.pdf>.

¹⁶ Curt Tarnoff, "The Marshall Plan: Design, Accomplishments, and Significance", *Congressional Research Service* 18, no.6 (January 2018):1-28, <https://www.ethiopianregistrar.com/files/sgp/crs/row/r45079.pdf>

¹⁷ "Lembar Fakta: Amerika Serikat dan ASEAN - Kemitraan Abadi," Kedutaan Besar dan Konsulat AS di Indonesia, August 7, 2019, <https://id.usembassy.gov/id/lembar-fakta-amerika-serikat-dan-asean-kemitraan-abadi/>.

¹⁸ International Crisis Group, "Responding to the Myanmar Coup," (Bangkok, February 2021), <https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/b166-responding-to-the-myanmar-coup.pdf>.

Luar Negeri, pengungsi, dan migrasi atau *Department of States/Bureau of Population, Refugees, and Migration's* (PRM) untuk pihak kerjasama dari organisasi non-pemerintah untuk membantu pengungsi Myanmar dan para pencari suaka di kamp yang berada di perbatasan Thailand.¹⁹

Amerika Serikat memiliki peran dalam mewujudkan bantuan kemanusiaan di Myanmar. Amerika Serikat berperan dalam memulai program kesehatan pada tahun 1998 dan memperluas bantuan kemanusiaan tersebut sebagai bentuk usaha dalam memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh bencana angin Nargis pada tahun 2008. Kemudian, Amerika Serikat kembali membentuk misi USAID secara penuh pada tahun 2012.²⁰ Di antara tahun 2017 dan 2020, Amerika Serikat melalui USAID memberikan bantuan pendanaan terhadap 1.500 aktivitas pelatihan dan kegiatan untuk mendukung pembangunan perdamaian dan rekonsiliasi serta melatih 258 organisasi lokal untuk meningkatkan kemampuan dalam bidang resolusi konflik. Dalam rangka memberdayakan masyarakat sipil dan pemulihan kembali dasar kebebasan, USAID melatih 255 media yang independen untuk laporan berita yang tidak bias, dan memperkuat kapasitas 235 organisasi masyarakat sipil untuk menyuarakan reformasi demokrasi.²¹

USAID juga bekerja sama dengan komunitas, masyarakat sipil, dan pemimpin desa untuk memastikan bahwa pemberian bantuan kesehatan lokal dan pelayanan pendidikan dijalankan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik untuk kebutuhan lokal dan untuk pihak yang di prioritaskan, pelayanan yang diberikan setara, serta mengurangi tensi antar etnis di daerah cenderung untuk berkonflik. Sejak pandemi melanda dunia saat ini, USAID menjadi pihak Internasional yang bekerja sama dengan Myanmar untuk berkontribusi dalam menanggulangi COVID-19, dan Amerika Serikat menjadi negara donor terbesar dalam pemberian bantuan kesehatan di Myanmar. Amerika Serikat juga memiliki peran pada saat terjadinya kudeta militer di Myanmar. Sejak peristiwa kudeta militer yang terjadi di Myanmar pada tanggal 1 Februari 2021, Myanmar menghadapi keadaan politik, ekonomi, Hak Asasi Manusia yang genting serta krisis kemanusiaan yang disebabkan oleh tindakan brutal yang dilakukan oleh militer yang kuat tanpa mendapatkan hukuman. Berdasarkan penjelasan dari Gedung Putih pada 11 Februari 2021, terkait peristiwa kudeta militer yang terjadi di Myanmar, Amerika Serikat melanjutkan dukungannya terhadap Myanmar yang berupa bantuan kemanusiaan terhadap populasi yang terdampak.²²

Pada September 2022, USAID juga kembali memberikan bantuan kemanusiaan dengan total lebih dari \$170 juta terhadap Myanmar dan Bangladesh yang semakin mempertegas tingkat konsisten AS terhadap upayanya dalam memberikan bantuan kepada Myanmar selama kudeta.²³ Dalam *press* tersebut, secara jelas AS menyampaikan tujuannya memberikan bantuan tersebut ialah untuk bantuan kemanusiaan tambahan untuk populasi rentan di Burma dan Bangladesh, termasuk dukungan untuk Rohingya yang

¹⁹ U.S Department of State, "U.S Relations with Burma", Retrieved August 7, 2021, from <https://www.state.gov/u-s-relations-with-burma/>.

²⁰ Ibid

²¹ Ibid

²² U.S Department of State, "U.S Relations with Burma", Retrieved August 7, 2021, from <https://www.state.gov/u-s-relations-with-burma/>

²³ U.S. Agency For International Development, "The United States Announces More than \$170 Million in Additional Humanitarian Assistance for Vulnerable People in Burma and Bangladesh", <https://www.usaid.gov/news-information/press-releases/sep-22-2022-united-states-announces-more-170-million-additional-humanitarian-assistance-vulnerable-people-burma-bangladesh>.

tetap tinggal di Burma, pengungsi Rohingya di Bangladesh, komunitas tuan rumah Bangladesh mereka yang dermawan, dan komunitas lain yang terkena dampak kudeta 2021 di Burma dan konflik yang meningkat serta represi yang mengikutinya. Jenis bantuan kemanusiaan dari dana tersebut terdiri dari banyak jenis diantaranya beragam fasilitas kesehatan, nutrisi, dan lainnya.

Bantuan berupa pendanaan, pelatihan, dan pemberian fasilitas makanan dan kesehatan yang diberikan AS terhadap Myanmar merupakan bentuk dari upayanya dalam memperluas *power* yang dimilikinya seperti yang disampaikan pada bagian sebelumnya. Hal ini berkaitan dengan konsep liberalisme pada asumsinya yang menekankan pada besarnya peran organisasi internasional terhadap perdamaian dunia dan terhadap HAM yang merupakan isu penting yang digagas oleh para liberalis. Dimana *foreign aid* yang juga merupakan konsep dalam Hubungan Internasional, bertindak sebagai alat yang digunakan AS dalam merealisasikan konsep kerjasama/ kolaboratif yang ada pada liberalisme. Yang mana, bantuan tersebut digunakan sebagai representasi dari “inisiatif hubungan baik” antara AS dan Myanmar.

c. Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Sebelum dan Setelah Kudeta Myanmar 2021

1. Sebelum Kudeta Myanmar 2021 (USAID Era Pemerintahan Presiden John F. Kennedy-Donald Trump):

Amerika Serikat telah memiliki kerjasama dengan Myanmar melalui departemen bantuan luar negeri yang disebut USAID (*United States Agency for International Development*) yang telah berdiri sejak 1961 oleh Presiden John. F. Kennedy yang didirikan untuk menyelamatkan nyawa, mengurangi kemiskinan, memperkuat pemerintahan yang demokratis dan membantu orang untuk maju.²⁴ AS dan Myanmar telah melakukan kerjasama ekonomi dari sejak 1950 berupa kerjasama bantuan menyediakan berbagai peralatan, persediaan, pelatihan, dan layanan teknis melalui hibah, pinjaman, dan penjualan komoditas pertanian.²⁵ Namun bantuan kerjasama tersebut ditutup pada tahun 1962 dikarenakan Myanmar mengalami kudeta.

Kemudian pada tahun 1978, Myanmar meminta AS untuk kembali menjalin hubungan kerjasama dengan USAID berfokus pada produksi jagung dan biji minyak, serta pemrosesan dan distribusi minyak nabati, meningkatkan perawatan kesehatan dasar dan kelangsungan hidup anak.²⁶ Namun bangkitnya kekuatan militer Myanmar pada tahun 1988 menyebabkan jumlah kekuatan oposisi demokrasi semakin kuat sehingga kerjasama Myanmar dengan USAID dihentikan dari tahun 1989 hingga sepuluh tahun kemudian.²⁷ Namun AS tidak sepenuhnya berhenti membantu pembangunan dan tetap mendukung HAM serta demokrasi di Myanmar dengan tetap memberikan bantuan kemanusiaan di perbatasan Myanmar-Thailand bersama NGO yang bergerak di bidang kemanusiaan.²⁸ Tahun 2003, terjadi penyerangan brutal

²⁴ Office of Press Relations, “Who We Are | U.S. Agency for International Development,” U.S. Agency for International Development, diakses Agustus, 6 2021, <https://www.usaid.gov/who-we-are>.

²⁵ Office of Press Relations, “History | Burma | U.S. Agency for International Development,” U.S. Agency for International Development, diakses Agustus, 6 2021, <https://www.usaid.gov/burma/history>.

²⁶ Ibid.

²⁷ Ibid.

²⁸ “U.S. Relations With Burma,” United States Department of State, June 3, 2021, <https://www.state.gov/u-s-relations-with-burma/>.

yang melanggar HAM terhadap partai NLD yang menyebabkan Presiden George W. Bush menjatuhkan sanksi terhadap Myanmar yang melarang impor produk dari Myanmar dan ekspor jasa keuangan ke Myanmar, dan membekukan aset SPDC dan tiga lembaga keuangan perdagangan luar negeri Myanmar yang ditunjuk (Perintah Eksekutif 13310.)²⁹ Pada tahun 2007, terjadi penghapusan subsidi bahan bakar minyak di Myanmar yang membuat Presiden Bush mengeluarkan Perintah Eksekutif 13348 yang memperluas sanksi untuk mencakup pembekuan aset terhadap individu yang ditunjuk sebagai bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia dan korupsi publik serta individu dan entitas yang menyediakan dana atau dukungan materi kepada orang-orang yang ditunjuk atau pemerintah militer di Myanmar.³⁰ Juli 2008, Kongres AS memberlakukan RUU Block Myanmar JADE (Usaha Anti-Demokrasi Junta) dimana RUU ini melarang impor batu rubi dan batu giok dengan tujuan untuk menghalangi aksi anti-demokrasi tersebut.³¹

Pada era pemerintahan Barack Obama, fokus kebijakan AS terhadap krisis HAM Myanmar lebih kepada upaya pendekatan dengan pihak militer dan negosiasi bersama para aktor yang berkonflik. Dimana pada tahun 2009, pada bulan Agustus, untuk pertama kalinya AS mengirim anggota Kongres AS untuk mengunjungi Myanmar yaitu Senator Jim Webb, dan pada bulan November, Asisten Menteri Luar Negeri Kurt Campbell melakukan perjalanan ke Myanmar untuk bertemu dengan pejabat pemerintah, pemimpin etnis minoritas dan pemimpin gerakan pro-demokrasi, termasuk Aung San Suu Kyi yang telah dipenjara.³²

Pada masa pemerintahan Donald Trump (2017-2021), terjadi penurunan yang cukup drastis dari tahun 2016 yaitu sebesar \$177 juta menjadi \$111 juta di tahun 2017.³³ Hal ini disebabkan karena adanya aksi perselisihan yang cukup brutal di kantor kelembagaan keuangan AS yang ada di Myanmar dan adanya aksi korupsi bantuan yang dilakukan oleh pejabat Myanmar, sehingga selain mengurangi bantuan, Trump juga memberikan sanksi penyitaan aset negara terhadap pejabat koruptor tersebut.³⁴

Pada masa sebelum terjadinya kudeta pada Februari 2021, USAID dan Myanmar telah menjalin hubungan kerjasama yang cukup lama. USAID juga telah memberikan banyak bantuan terhadap Myanmar dengan total dari tahun 2001-2020 yaitu \$180,886,190 atau setara dengan Rp. 2,612,810,571,455.00.³⁵ Selain memberikan bantuan materi melalui USAID, Amerika Serikat juga memberikan sanksi baik kepada regulasi ekspor-impor AS-Myanmar namun juga sanksi penyitaan aset terhadap pejabat-pejabat negara Myanmar yang terbukti melakukan pelanggaran HAM. Bantuan dan sanksi tersebut dilakukan dengan tujuan agar Myanmar bisa secara konsisten dalam melaksanakan

²⁹ Institute of Southeast Asian Studies, "Timeline: US-Burma/Myanmar Relations," *Contemporary Southeast Asia Journal* 32, no 3 (2010): 435, <https://www.jstor.org/stable/25798870>.

³⁰ Ibid.

³¹ Institute of Southeast Asian Studies, "Timeline: US-Burma/Myanmar Relations," *Contemporary Southeast Asia Journal* 32, no 3 (2010): 435-436, <https://www.jstor.org/stable/25798870>.

³² Institute of Southeast Asian Studies, "Timeline: US-Burma/Myanmar Relations," *Contemporary Southeast Asia Journal* 32, no 3 (2010): 436, <https://www.jstor.org/stable/25798870>.

³³ U.S. Agency for International Development, "U.S. Foreign Aid by Country|Myanmar," *Foreign Aid Explorer*, Juli, 2021, https://foreignassistance.gov/cd/MMR?implementing_agency_id=1&measure=Obligations&fiscal_year=2017

³⁴ Toosi, N, "Trump officials split over punishing Myanmar for atrocities," *POLITICO*, July 31, 2018, <https://www.politico.com/story/2018/07/31/myanmar-rohingya-white-house-trump-officials-752730>

³⁵ U.S. Agency for International Development, "U.S. Foreign Aid by Country|Myanmar," *Foreign Aid Explorer*, Juni, 2021, https://foreignassistance.gov/cd/MMR?fiscal_year=2020&implementing_agency_id=1&measure=Obligations

perlindungan dan dukungan HAM serta demokrasi kepada seluruh masyarakat dan wilayah Myanmar.

2. Setelah Kudeta Myanmar 2021 (USAID Era Pemerintahan Joe Biden):

Setelah pemberitaan kudeta Myanmar terdengar pada tanggal 2 Februari 2021, Joe Biden bersama dengan USAID segera mengirimkan bantuan dana sebesar \$42.4 juta kepada pemerintahan Myanmar dalam menanggulangi masalah kudeta tersebut.³⁶ Selain dana dari USAID, Amerika Serikat juga akan memberikan dana tambahan dari kerjasama AS-Myanmar berupa dana sekitar \$69 juta kemudian akan turut membantu penanggulangan covid-19 serta penanganan sipil lainnya.³⁷ Kemudian, USAID kembali memberikan bantuan kemanusiaan sebesar lebih dari \$170 juta berupa berbagai macam bantuan dari segi pangan dan kesehatan. Ini menjelaskan bahwa Amerika Serikat sangat tanggap dengan permasalahan HAM di Myanmar. Dan artinya bahwa baik sebelum maupun sesudah kudeta Myanmar 2021 terjadi, Amerika Serikat tetap konsisten dalam memenuhi misi dukungan HAM dan demokrasinya di Myanmar. Dan ini semakin menyimpulkan adanya konsistensitas dari AS selaku aktor yang selalu mempromosikan liberalisme.

d. USAID dan Pengaruhnya dalam Kudeta militer Myanmar 2021

Sejak adanya *United States Agency for International Development*, Amerika Serikat mencoba untuk memperluas pengaruh mereka di berbagai negara. Salah satunya yaitu Myanmar. Sejak 2012 hingga 2020, USAID telah memberikan bantuan ke Myanmar baik dalam bentuk finansial maupun dalam bentuk sosial lainnya. Lalu, Amerika Serikat selalu mengupayakan kedamaian dan demokrasi bagi Myanmar. Hal tersebut sangat mencerminkan Amerika Serikat sebagai negara dengan ideologi liberal mereka. Baru-baru ini pada tahun 2020, USAID membantu memajukan hak asasi manusia di seluruh negeri melalui advokasi dengan para pembuat keputusan utama, sementara juga membantu komunitas dan masyarakat sipil untuk mengurangi konflik, mendukung proses perdamaian formal dan informal, mendukung inisiatif dan dokumentasi peradilan yang dipimpin oleh domestik. Pelanggaran hak asasi manusia, dan meningkatkan pemerintahan lokal. Namun, tantangan pembangunan yang berasal dari warisan pemerintahan otoriter, independensi peradilan yang terbatas, dan represi terhadap kebebasan, sehingga USAID juga memberdayakan masyarakat sipil dalam menciptakan kebebasan individu dengan melatih media-media setempat.

Selain tantangan kapasitas dan situasi domestik yang menjadi salah satu pemicu masifnya bantuan AS terhadap Myanmar, keberadaan pengaruh Tiongkok dan perilaku politiknya yang berbeda dengan negara-negara lainnya pada aksinya yang tetap memberikan bantuan BRI (Belt and Road Initiative) kepada Myanmar dan menjadikannya sebagai investor yang masih mempercayai pemerintahan Junta Militer turut menjadi pertimbangan besar bagi AS untuk terus memberikan bantuan sebagai alat promotor demokrasinya.³⁸ Hal ini menunjukkan bahwa meskipun USAID sudah melakukan bantuan terhadap Myanmar dari sebelum kudeta terjadi, namun munculnya pengaruh Tiongkok yang justru

³⁶ Office of Press Relations, "USAID Immediately Redirects \$42 Million in Response to the Military," U.S. Agency for International Development, Februari 11, 2021, <https://www.usaid.gov/news-information/press-releases/feb-11-2021-usaid-immediately-redirects-42-million-response-military-coup-burma>.

³⁷ Ibid.

³⁸ Kurlantzick, Joshua. "China Goes All in with Support for Myanmar's Military Regime." *The Japan Times*, April 14, 2022. <https://www.japantimes.co.jp/opinion/2022/04/14/commentary/world-commentary/china-backs-myanmar/>.

melegitimasi Junta Militer sebagai aktor yang mengganggu demokratisasi Myanmar, telah mendorong USAID untuk lebih masif dalam mencapai kepentingannya untuk memperluas demokrasi di dunia.

Presiden Biden mengeluarkan Perintah Eksekutif 14014, menetapkan kerangka kerja untuk sanksi AS dalam menanggapi kudeta. Sanksi AS telah ditargetkan, difokuskan untuk mempromosikan akuntabilitas bagi para pemimpin militer yang bertanggung jawab atas kudeta dan kekerasan terhadap rakyat Myanmar, serta orang lain yang mendukung atau mendapat untung dari rezim militer. Tujuan utama dari kampanye sanksi adalah untuk membebankan biaya pada rezim militer dan mempromosikan pertanggungjawaban atas kudeta dan pelanggaran hak asasi manusia, sambil menghindari kerugian ekonomi bagi rakyat Myanmar. Selain itu, Amerika Serikat telah mendorong koalisi mitra internasional untuk mengutuk kudeta militer dan mengambil tindakan terkoordinasi, sanksi telah ditargetkan, difokuskan untuk mempromosikan akuntabilitas bagi para pemimpin militer yang bertanggung jawab atas kudeta dan kekerasan terhadap rakyat Myanmar, serta orang lain yang mendukung atau mendapat untung dari rezim militer. Tujuan utama dari kampanye sanksi adalah untuk membebankan biaya pada rezim militer dan mempromosikan pertanggungjawaban atas kudeta dan pelanggaran hak asasi manusia, sambil menghindari kerugian ekonomi bagi rakyat Myanmar. Hal ini menjelaskan bahwa AS memang merupakan aktor liberalis yang sangat berpengaruh dalam mencapai tujuan perdamaian yang disampaikan konsep liberal dengan menggunakan bantuannya tersebut. Upaya sanksi ini juga memperjelas kepentingan AS dibawah kepemimpinan Joe Biden yang berkepentingan dalam menyebarkan nilai demokrasi dan menentang bentuk pemerintahan selain demokrasi yang dipandanginya sebagai tindakan penindasan HAM.

Jika kita lihat dari serangkaian peristiwa yang telah dijabarkan diatas, Amerika Serikat menunjukkan sifat kerjasama yang telah mereka ciptakan. Hal tersebut memang mencerminkan ideologi Liberalisme dimana kerjasama serta organisasi non-negara menjadi salah satu aktor yang berpengaruh bagi Amerika Serikat ke Myanmar. Didasari dengan nilai liberalisme dalam menjunjung tinggi perdamaian, demokrasi dan hak asasi manusia melalui program bantuan luar negeri Amerika Serikat serta mendukung tujuan *United States Agency for International Development* (USAID), sebagai Lembaga pembangunan internasional dari Amerika Serikat dan sebagai katalisator bertujuan mendorong pembangunan yang menunjukkan kemurahan hati Amerika Serikat , dan mempromosikan jalan menuju kemandirian dan ketahanan penerima bantuan.

Kesimpulan

Secara keseluruhan dapat kita simpulkan bahwa Amerika Serikat sebagai negara yang memiliki pengaruh kuat dalam sistem internasional melalui *United States Agency for International Development* (USAID) melaksanakan program bantuan luar negeri dalam membantu proses demokratisasi dan melindungi hak asasi manusia Myanmar dimana pada tahun ini mengalami kudeta militer kembali serta memperkuat hubungan Amerika Serikat dan Myanmar itu sendiri. USAID memberikan bantuan kepada Myanmar baik dalam bentuk finansial dan sosial. Hal tersebut didasari dari tujuan USAID sebagai Lembaga internasional yang membantu untuk memperkuat negara-negara rapuh, bantuan kemanusiaan termasuk terkait kesehatan seperti Covid-19, sehingga peran dari USAID menunjukkan kemurahan hati Amerika Serikat dalam menciptakan perdamaian negara tersebut. Amerika Serikat membentuk USAID sebagai langkah untuk membantu negara-negara terbelakang yang memiliki keterbatasan dalam hal kebebasan individu. Myanmar sebagai negara yang sudah sejak lama menerima bantuan dari USAID dari

pemerintahan presiden Amerika Serikat John Kennedy sampai saat ini Joe Biden dalam mendukung hak-hak masyarakat Myanmar yang sulit mengalami kemajuan dikarenakan ketidakstabilan politik dan pemimpin negara mereka sendiri yang menghambat perkembangan negara tersebut. Oleh karena itu USAID mencoba membantu menghilangkan hambatan tersebut untuk mendukung keinginan dari masyarakat untuk kembali kepada pemerintah sipil dan bantuan luar negeri yang diberikan dapat membantu masyarakat Myanmar dalam meraih kebebasan mereka dan membentuk pemerintahan yang demokratis dan menghormati hak asasi rakyatnya.

Referensi

- Aida, R. N. (2021, February 12). Kudeta Myanmar, Sebab, dan Apa yang Sebenarnya Terjadi? *KOMPAS.Com*. <https://www.kompas.com/tren/read/2021/02/12/123000265/kudeta-myanmar-sebab-dan-apa-yang-sebenarnya-terjadi-?page=1>
- Bakry, U.S. (2017). *Dasar-Dasar Hubungan Internasional*. Jakarta: Kencana
- Devi, K. S. (2014). Myanmar under the military rule 1962-1988. *International Research Journal of Social Sciences*, 3(10), 46-50. <http://www.isca.in/IJSS/Archive/v3/i10/8.ISCA-IRJSS-2014-173.pdf>
- Enos, O (2021). *Scaling up the U.S. Response to the Coup in Burma* (Report No. 3629). The Heritage Foundation. <https://www.heritage.org/asia/report/scaling-the-us-response-the-coup-myanmar>
- Hidriyah, S. (2011). Proses Demokratisasi Myanmar Menuju Pemilu Presiden Tahun 2012. *P3DI Sekretariat Jenderal DPR RI*, Vol. III, No. 24 (December 2011):1-8. http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-III-24-II-P3DI-Desember-2011-60.pdf.
- History | Myanmar | U.S. Agency for International Development*. (n.d.). U.S. Agency for International Development. Retrieved August 6, 2021, from <https://www.usaid.gov/Myanmar/history>
- Institute of Southeast Asian Studies. (2010). Timeline: US-Myanmar/Myanmar Relations. *Timeline: US-Myanmar/Myanmar Relations*, 32(3), 434-436. <https://www.jstor.org/stable/25798870>
- International Crisis Group (2021). *Responding to the Myanmar Coup*. <https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/b166-responding-to-the-myanmar-coup.pdf> .
- Jakarta, E. U. S. (2019, August 8). *Lembar Fakta: Amerika Serikat dan ASEAN – Kemitraan Abadi*. Kedutaan Besar dan Konsulat AS di Indonesia. <https://id.usembassy.gov/id/lembar-fakta-amerika-serikat-dan-asean-kemitraan-abadi/> .
- O.P.R. (2001, February 11). *USAID Immediately Redirects \$42 Million in Response to the Military*. U.S. Agency for International Development. <https://www.usaid.gov/news-information/press-releases/feb-11-2021-usaid-immediately-redirects-42-million-response-military-coup-myanmar>
- O.P.R. (2021, May 18). *United States Announces Nearly \$155 Million in New Funding for the*. U.S.

- Agency for International Development. <https://www.usaid.gov/news-information/press-releases/may-18-2021-us-announces-nearly-155-million-new-funding-Myanmar-bangladesh-crisis>
- Tarnoff, C. (2018). *The Marshall plan: Design, accomplishments, and significance* (Vol. 18). Congressional Research Service. <https://www.ethiopianregistrar.com/files/sgp/crs/row/r45079.pdf> .
- Toosi, N. (2018, July 31). *Trump officials split over punishing Myanmar for atrocities*. POLITICO. <https://www.politico.com/story/2018/07/31/myanmar-rohingya-white-house-trump-officials-752730>
- U.S. Agency for International Development. (2021, July). *U.S. Foreign Aid by Country/Myanmar*. Foreign Aid Explorer. https://foreignassistance.gov/cd/MMR?implementing_agency_id=1&measure=Obligations&fiscal_year=2017
- U.S. Agency for International Development. (2021a, June). *U.S. Foreign Aid by Country/Myanmar*. Foreign Aid Explorer. https://foreignassistance.gov/cd/MMR?fiscal_year=2020&implementing_agency_id=1&measure=Obligations
- U.S. Relations With Myanmar. (2021, June 3). United States Department of State. <https://www.state.gov/u-s-relations-with-Myanmar/>
- Viotti, P. R dan Mark V. K. (2012). "International Relations Theory:Fifth Edition. (United States: Pearson Education Inc), 129-130.
- Who We Are* | U.S. Agency for International Development. (n.d.). U.S. Agency for International Development. Retrieved August 6, 2021, from <https://www.usaid.gov/who-we-are>
- Yazid, N. M. (2015). The theory of hegemonic stability, hegemonic power and international political economic stability. *Global Journal of Political Science and Administration*, 3(6), 67-79. <https://www.eajournals.org/wp-content/uploads/The-Theory-of-Hegemonic-Stability-Hegemonic-Power-and-International-Political-Economic-Stability-1.pdf>.